



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN 2023

"Penguatan Riset, Inovasi, Kreativitas Peneliti dan Pengabdian di Era 5.0"

LP2M-Universitas Negeri Makassar, 4 November 2023

Modeling Collaboration Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar

Muh. Rizal S¹, Muhammad Luthfi Siraj², Syarifuddin³

¹²³Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

e-mail: rizalsuyuti@unm.ac.id

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui model kolaborasi government dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kota Makassar, dan untuk mengetahui mengapa pengembangan UMKM di Kota Makassar tidak terimplementasi secara efektif. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan segala fenomena bagaimana kolaborasi government dalam pengembangan UMKM di Kota Makassar. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini Collaborative Culture, Collaborative Leadership, Collaborative Vision, Collaborative Team Process dan Collaborative Structure. Jenis sumber data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian model kolaborasi government dan swasta dalam pengembangan UMKM dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dapat dikategorikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai untuk dari setiap komponen pada aspek yang dijadikan pengukuran dalam penelitian ini, mulai dari aspek hubungan kemitraan dan manfaat yang diperoleh pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UKM dinilai kemitraan yang terjalin bersama para instansi pemerintah lain dan industry tidak saling membangun komunikasi untuk bersama-sama merencanakan suatu program efektif untuk pengembangan skala usaha di Makassar. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kemitraan oleh pemerintah di Makassar dalam mengembangkan UMKM yang dimana terdapat masalah yang menghambat dan juga dapat menjadi pendukung dalam pemberdayaan usaha kecil yaitu faktor bahan baku, faktor permodalan, faktor produksi, faktor pemasaran dan lokasi penjualan.

Kata Kunci: Model, Kolaborasi, Governance, UMKM

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui model kolaborasi government dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kota Makassar, dan untuk mengetahui mengapa pengembangan UMKM di Kota Makassar tidak terimplementasi secara efektif. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan segala fenomena bagaimana kolaborasi government dalam pengembangan UMKM di Kota Makassar. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini Collaborative Culture, Collaborative Leadership, Collaborative Vision, Collaborative Team Process dan Collaborative Structure. Jenis sumber data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian model kolaborasi government dan swasta dalam pengembangan UMKM dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dapat dikategorikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai untuk dari setiap komponen pada aspek yang dijadikan pengukuran dalam penelitian ini, mulai dari aspek hubungan kemitraan dan manfaat yang diperoleh pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UKM dinilai kemitraan yang terjalin bersama para instansi pemerintah lain dan industry tidak saling membangun komunikasi untuk bersama-sama merencanakan suatu program efektif untuk pengembangan skala usaha di Makassar. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kemitraan oleh pemerintah di Makassar dalam mengembangkan UMKM yang dimana terdapat masalah yang menghambat dan juga dapat menjadi pendukung dalam pemberdayaan usaha kecil yaitu faktor bahan baku, faktor permodalan, faktor produksi, faktor pemasaran dan lokasi penjualan.

Kata Kunci: Model, Kolaborasi, Governance, UMKM

I. PENDAHULUAN

Mokhammad dan Hartono (2011:2) mengemukakan bahwa dalam kesuraman krisis ekonomi, industri besar yang semula cukup memberikan kontribusi besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, namun saat krisis satu persatu ambruk. Berkebalikan dengan UMKM yang dinilai telah memberikan pembuktian pada saat krisis mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, salah satu cara yang bisa ditempuh dalam menangani problem kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat melalui kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi ekonomi yang ada di sekitarnya serta tingkat kemampuan yang dimilikinya, (Akib;2011).

Secara eksplisit kondisi nyata diketahui UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia bahkan dengan UMKM akan dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia, hal ini juga dijelaskan oleh Rizal, dkk (2021:621) bahwa sementara itu, peran UMKM adalah UMKM tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang tetapi juga dinegara maju yang sangat penting karena mereka menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu UMKM juga dapat berperan dalam Situasinya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa Usaha kegiatan usaha yang mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada berperan dalam proses pendapatan masyarakat, mendorong mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Darwanto (2008:22) mengemukakan bahwa pertumbuhan pemerataan dan ekonomi, dan beberapa alasan kuat mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikembangkan untuk menyerap banyak tenaga kerja

Kondisi perkembangan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar saat ini mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 tercatat lebih dari 940 ribu unit usaha, kemudian menjadi sekitar 1,2 juta pada 2020 dan meningkat lagi jumlahnya menjadi 1,5 juta unit usaha pada 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan 1,6 juta unit usaha, sehingga dari kenaikan ini dapat dipahami bahwa upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk memberikan penguatan kepada masyarakat untuk peningkatan ekonomi dapat dilakukan melalui UMKM. Strategi pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pengembangan UMKM tidak terjadi pemerataan, dimana skala usaha mikro dan kecil untuk meningkat ke jenis level yang lebih tinggi masih dikategorikan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, (Mulyanto; 2006) solusi yang berbeda di dalam upaya pengembangan usaha kecil harus memiliki paradigma transformatif. Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dan dilakukan transformasi oleh pemerintah setempat (Ansell dan Altson; 2007) ialah dengan melalui memaksimalkan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dalam membangun dan mengembangkan sector UMKM yang tujuannya agar jenis level usaha terutama mikro dapat mengalami peningkatan ke level usaha menengah sehingga pola usaha yang dijalankan oleh para pelaku tidak mengalami kondisi yang statnan, apalagi dengan mengingat kondisi kebutuhan saat ini yang terbilang cukup tinggi mulai dari kesehatan, pendidikan, bahan pokok dan lainnya.

Mengembangkan UMKM perlu kerjasama antar para stakeholder terkait, Austin, et al (dalam Winarno, 2012) dimensi penting untuk keberhasilan kolaborasi lintas sektor, diantaranya membangun dan mengembangkan hubungan serta mencapai keselarasan antara misi. Peran pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Koperasi dan

UMKM dituntut untuk berinovasi terhadap sistem kerjasama yang selama ini dilakukan bersama berbagai pihak, Frederickson (2003:45) mengungkapkan bahwa sistem pemberian pelayanan kepada publik (*delivery service system*) merupakan salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang akan dimaksimalkan. Dalam bentuk kerjasama sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan model untuk menciptakan kolaborasi yang efektif, sebagaimana salah satu contoh model Penta Helix dengan rumus ABCGM yang merupakan singkatan dari *Academy, Bussines, Commuity, Goverment*, dan Media cocok digunakan sebagai model kerjasama (Slamet dkk, 2017). Program pengembangan UMKM berkaitan dengan berbagai sektor pada proses bisnis yang dijalankan, sehingga membutuhkan peran dari berbagai stakeholder, hal ini juga dikemukakan oleh Carpenter (2009) bahwa kolaborasi partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan.

Permasalahan pada aspek kolaborasi pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang juga dinilai masih kurang efektif, yang dimana sistem kerjasama yang dibangun oleh pihak Dinas belum memberikan kontribusi besar untuk kemudahan bagi para pelaku UMKM di dalam mengatasi permodalan dan persoalan perizinan tempat berwirausaha serta masalah kurangnya pembinaan manajerial dan keterampilan dalam berwirausaha. Padahal diketahui di Kota Makassar memiliki banyak Industri besar, pihak swasta yang dapat dimanfaatkan untuk dikolaborasikan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha memahami suatu proses yang kompleks (Imperial, 2001), atau menguraikan bagaimana faktor-faktor kontekstual mempengaruhi suatu proses atau program yang kompleks (Maxwell

1996; Miles and Huberman, 1994). Pendekatan deskriptif juga bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kolaborasi government dan swasta dalam pengembangan UMKM di Kota Makassar. Sumber data penelitian dilakukan melalui data primer serta data sekunder sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data oleh (Creswell; 2003) melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta Pengecakan Keabsahan Data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Interaktif dari Miles & Huberman (2014) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing*/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pemberdayaan UMKMyang mampu menumbuhkan tingkat persaingan UMKM di Kota Makassar yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 17 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, peraturan daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan kepada koperasi dan usaha kecil yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing serta Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.

a. Kolaborasi Aktor pada Dimensi Membangun dan Mengembangkan Hubungan

Berdasarkan hasil temuan penelitian kolaborasi aktor yang ditunjukkan antara

pemerintah Kota Makassar dengan aktor dari lembaga swasta serta pelaku usaha yang dinilai tidak terjalin dengan efektif, hal ini ditandai adanya masih banyak dari pihak aktor yang tidak terlibat sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Makassar sehingga masih banyak pihak aktor terutama bagi pihak swasta maupun masyarakat dalam tidak memahami dengan baik dari apa yang dihasilkan pada rancangan program pengembangan dan pembinaan UMKM Kota Makassar.

UMKM yang berada di Kota Makassar, dimana Pemerintah Kota Makassar telah melakukan kebijakan program berkaitan dengan peningkatan pengembangan UMKM yang diadakan pada tahun 2022, yaitu: 1) bimtek pola pengelolaan limbah rumah tangga untuk UMK, 2) bimtek teknik pengelolaan warung makan, 3) fasilitasi pemasaran produk UMKM dengan pelaku bisnis, 4) pengembangan pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha jasa Laundry, 5) pemanfaatan informasi teknologi dalam peningkatan kualitas UKM, 6) peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UMKM, 7) lomba lorong UKM, 8) sentra Galeri produk unggulan koperasi dan UKM, 9) penyelenggaraan promosi produk unggulan, dan 10) workshop peningkatan pengelolaan keuangan UMKM. Berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Makassar dari beberapa program pemerintah yang telah dilaksanakan yaitu lantaran terbentuk pengelolaan manajemen pemberdayaan dimana banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan namun tidak ada follow up yang dilakukan setelah pelatihan, informasi terkait program dari pemerintah baik yang sudah maupun akan dilaksanakan sulit di akses, dan program permodalan yang dilakukan tidak tersosialisasi dengan baik dan merata terhadap semua pelaku usaha.

Model kolaborasi pemerintah kepada mitra dan juga para pelaku usaha dalam pengembangan UMKM di Makassar dilakukan dengan dasar kebijakan optimasi

tujuan. Optimisasi tujuan oleh (Ansell dan Altson; 2007) yaitu keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam hal ini, organisasi harus mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi yang optimal. Dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa cara memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan operasi dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait bahwa dengan cara bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing melalui sosialisasi walaupun belum terkhusus secara menyeluruh.

Sesuai dengan petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dalam penataan Pelaku usaha berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2006 terdapat beberapa hambatan pada saat dilakukan relokasi karena masih banyaknya pedagang yang kukuh dengan pendiriannya karena takut kehilangan pelanggan. Selanjutnya sejalan dengan optimisasi tujuan dalam hal ini, organisasi harus mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi yang optimal. Selain itu, Nampak juga kolaborasi aktor ini tdiak dilakukan komunikasi yang interaktif, jelas dan transparan sehingga terkadang ada berbagai informasi yang tidak diketahui dan dipahami dengna baik oleh para *stakeholders* lainnya. (Islamy; 2018, Thoha; 2008) mengemukakan bahwa: "Implementasi kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh salah satu faktor komunikasi. Faktor komunikasi dalam teori tersebut merupakan faktor yang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan UMKM. Walupun secara kuantitas diketahui bahwa pemerintah

Kota Makassar selaku kooordinator utama dalam pengembangan UMKM ini sudah membangun hubungan bersama berbagai pihak aktor.

Kekurangan yang dinilai pengimplementasikan program pengembangan UMKM di Makassar yang masih terbatas masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal serta peralatan mesin tersebut yang dikarenakan pengalokasian program seperti Kredit Usaha Rakyat dan Program KUBE tidak tepat sasaran dikarenakan adanya komunikasi antar sektor lembaga yang tidak terlibat dalam perencanaan. Melihat dari pada intensitas koordinasi antar stakeholders yang sangat tergolong rendah dimana pemerintah kota Makassar belum mampu membangun jaringan terhadap para investor yang dapat berinvestasi untuk penyediaan fasilitas sarana yang memadai untuk mengembangkan berbagai program inovatif yang diperuntukkan pelaku usaha, padahal sebagaimana teori oleh Carlsson dan Kacmar (2000) bahwa dalam analisis Jaringan kebijakan dalam suatu kajian menggunakan teori "*Network*: adalah hal yang tidak memuaskan, sehingga disarankan bahwa salah satu cara untuk memajukan pendekatan Jaringan kebijakan adalah dengan menerapkan melihat dimensi baru, yakni dimensi koordinasi, hal ini disebabkan oleh karena suatu kebijakan harus dikerjakan bersama-sama oleh beberapa aktor yang terlibat.

Selain daripada teori Carlsson juga diperkuat teori dari Gage & Mandell (1990) dalam Kadji (2015) yang menjelaskan jaringan organisasi dicirikan dengan adanya koordinasi yang terjalin baik secara langsung maupun tidak langsung antar setiap aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan. Organisasi jaringan dapat diatur melalui koordinasi yang rutin antara para aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan. Pengembangan jaringan terhadap beberapa institusi atau lembaga diluar pemerintahan dan masyarakat didalam membangun network untuk suatu permasalahan publik, harus juga terdapat tujuan bersama antar aktor-aktor didalam

menjalin kerjasama tersebut. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya konflik yang akan terjadi jika tiap-tiap aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda sehingga akan menghambat terjalinnya kolaborasi aktor dalam proses pembuatan maupun pengambilan kebijakan publik terutama percepatan pengembangan energy terbarukan melalui program kendaraan listrik yang menjadi penantian setiap masyarakat, tentu Collaboratif antar aktor ini juga diperuntukkan untuk melihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat lokal didalam melakukan proses, pengelolaan, dan pengambilan keputusan permasalahan yang terjadi di masyarakat (Adawiyah; 2013).

b. Kolaborasi Aktor pada Dimensi Menghasilkan Keuntungan Bagi Mitra dan Masyarakat

Kolaborasi aktor pada dimensi keuntungan bagi mitra dilihat juga dari Perspektif Sistem, organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan organisasi. Perspektif sistem diartikan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penataan pelaku usaha dan bentuk kerjasama dari setiap SKPD dalam proses pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian hasil wawancara bersama berbagai informan menunjukkan bahwa dalam proses pengembangan UMKM di Makassar terdapat beberapa unsur yang saling mendukung dan melengkapi dalam hal ini SKPD terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM, dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Perdagangan, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun unsur tersebut dalam proses pencapaian tujuan menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing walaupun belum maksimal dari segi pengembangan UMKM.

Bentuk tindakan peran pemerintah dalam pengembangan pelaku usaha sudah cukup

bagus walaupun belum sepenuhnya belum efektif. Ini dapat dilihat dari strategi pemerintah untuk mengajak para pelaku usaha untuk dilakukan relokasi baik melalui pendekatan dan sosialisasi, (Smith and Christopher; 2009). Namun dalam memberikan sanksi, pemerintah belum begitu tegas karena tidak dilakukan secara merata atau serempak dan juga tindakan penertiban dilakukan kadang ketika ada acara tertentu.

Keberhasilan suatu proses kebijakan ataupun program pemerintah daerah tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yang ada, di era otonomi seperti sekarang ini menuntut perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga setiap instansi pemerintahan yang ada di daerah seringkali melakukan kerjasama baik dalam ruang lingkup sektor pemerintahan, sektor swasta atau publik itu sendiri. Pembangunan UMKM yang melibatkan berbagai stakeholder diharapkan pemerintah dan pihak swasta untuk senantiasa bekerjasama untuk menjalankan kebijakan tersebut yang lebih mengutamakan pada aspek mutu dan kepentingan masyarakat. Konsep ini tidak lepas dari pendefinisian tentang kebijakan publik berupa semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Inggarwati, et al; 2010).

Berdasarkan temuan penelitian ini juga diketahui kemitraan atau kerjasama sangatlah penting dalam mewujudkan suatu kebijakan sebab dengan adanya kemitraan bersama pihak lain akan dapat membantu proses kebijakan tersebut terimplementasi sesuai dengan rencana, sebagaimana kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda, (Djumara; 2008).

Peran pemerintah kota Makassar atas kerjasama yang dilakukannya dalam

pembangunan UMKM juga merupakan bentuk wujud konsep *good governance*, (Wilson; 2006) yang dimana produk kebijakan apapun yang siap diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders*, dimana oleh Kadji (2015) menegaskan bahwa dalam domain *Good Governance* terdapat tiga sektor yang bersentuhan langsung dengan kebijakan publik dan pengelolaan tata pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yakni *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society*. Ketiga aktor ini adalah kunci dari keberhasilan suatu kebijakan yang akan dibuat dan dilaksanakan termasuk dalam hasil pembangunan UMKM di Kota Makassar.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini terkait temuan penelitian disimpulkan bahwa Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dapat dikategorikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai untuk dari setiap komponen pada aspek yang dijadikan pengukuran dalam penelitian ini, mulai dari aspek hubungan kemitraan dan manfaat yang diperoleh pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UKM dinilai kemitraan yang terjalin bersama para instansi pemerintah lain dan industri tidak saling membangun komunikasi untuk bersama-sama merencanakan suatu program efektif untuk pengembangan skala usaha di Makassar. Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kemitraan oleh pemerintah di Makassar dalam mengembangkan UMKM yang dimana terdapat masalah yang menghambat dan juga dapat menjadi pendukung dalam pemberdayaan usaha kecil yaitu faktor bahan baku, faktor permodalan, faktor produksi, faktor pemasaran dan lokasi penjualan.

Hasil kesimpulan dari temuan penelitian ini juga disarankan pemerintah setempat harus dapat membuat rancangan program yang lebih strategis untuk mengatasi masalah yang terjadi

pada usaha kecil saat ini dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan terkait bidang wirausaha serta mengatur regulasi harga produksi dan harga bahan pokok makanan khususnya pada jenis usaha kecil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar yang telah mendanai penelitian ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum beserta jajarannya atas segala dukungannya selama penelitian berlangsung.

REFERENSI

- Akib, Haedar. 2011. *Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan*. Jurnal Administrari Publik Vol 2 (1). Hal 3-4.
- Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. (2013). *Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas*. Journal & Proceeding. (Online), Jurnal Vol 1, No. 1
- Anggraeni, Feni Dwi, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. 2020. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal di Kecamatan Blimbing, Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295.
- Ansell, Chris dan Altson Gash. 2007. *Collaorative Governance in Theory and Practice*. Journal of Publikc Administration Research and Theory. Vol 18 No. 4, hal. 54-571.
- Creswell, J. W., 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications, Inc.
- Djumara, Noorsyamsa. 2008. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Inggarwati, K., Kaudin, A. 2010. *Peranan Faktor-Faktor Individual dalam Mengembangkan Usaha, Studi Kuantitatif pada Wirausaha Kecil di Salatiga*. Integritas, Jurnal Manajemen Bisnis. Vol.3. No.2 (185-202).
- Islamy, La Ode. 2018. *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publiiser
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Nugroho D., R., 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Kraft and Furlong, 2004.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan. Tjetjep.
- Mokhamad, Taufik dan Hartono. 2011. *Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Potensi EKonomi Masyarakat*. Jurnal ISSN No. 20881 WIGA .Vol.1 No.1, Hal. 1-12
- Parsons, Wayne, 2005. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cambridge: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Rizal, Muh, dkk. 2021. *Investment Patterns of Small and Medium Micro Enterprises (MSMEs) in Sinjai District*. Advances in

Social Science, Education and
Humanities Research, volume 603
Proceedings of the International Joined
Conference on Social Science.

Smith, Kevin B., and Christopher W. Larimer,
2009. *The Public Policy Theory Primer*.
Philadelphia: Westview Press.

Thoha, M., 2008. *Ilmu Administrasi Publik
Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Wilson, Charter A., 2006. *Public Policy:
Continuity and Change*. New
York: McGraw-